

SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

PROPINSI NUSA TENGGARAN BARAT – PULAU SUMBAWA

Kabupaten Dompu

Visi Kabupaten Dompu

VISI TATA KEPEMERINTAHAN LOKAL YANG DEMOKRATIS MENUJU DOMPU MANGGINI, MANGGARI, MATAROA

Kabupaten Dompu *manggini, manggari, mataroa* menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak. Perencanaan yang melibatkan para pihak (Warga, OMS, proyek/donor dan stakeholder pembangunan lainnya) dimana Bappeda dan Litbang sebagai badan yang memiliki peran utama dalam proses perencanaan pembangunan. Proses ini akan mampu menumbuhkan keswadayaan warga dalam proses pembangunan untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Forum Lintas Aktor (FLA) menjadi penggerak dalam membangun interaksi dinamis, komunikasi, koordinasi dan berbagi pembelajaran bersama. Forum lintas aktor ini memanfaatkan sekretariat bersama untuk memastikan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntable baik di tingkat Desa, Kecamatan sampai lingkup Kabupaten.

Data dan informasi yang lengkap dan akurat tersedia, mudah diakses dan dimanfaatkan oleh para pihak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Data dan informasi ini juga menggambarkan keberadaan asset, potensi dan peluang sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses-proses pembangunan diatas.

Program pembangunan diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Kualitas layanan didukung perubahan perilaku yang profesional sesuai dengan standard pelayanan minimal ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan berkualitas. Di seluruh wilayah Kabupten Dompu tersedia sarana pendidikan, akses terhadap pasar dan PUSPELKEs siaga yang dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, bermutu, terjangkau bagi orang miskin. Sementara pembangunan sarana prasarana benar-benar ramah lingkungan.

Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat diwujudkan untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat miskin, anak, perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Sehingga tidak ada lagi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di kabupaten Dompu. Kesetaraan laki-laki dan perempuan terwujud.

Kebijakan yang pro poor dijalankan dengan optimal sehingga mampu menyediakan pelayanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, dan mampu mendorong peningkatan pendapatan keluarga. APBD menggambarkan belanja publik dan belanja aparat yang proporsional yang dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat banyak. Tumbuh kembang anak, partisipasi dan perlindungan terwujud. Proses-proses pembangunan memberikan penghargaan kepada anak dan

pemuda untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakatnya yang tertuang dalam kebijakan dan anggaran. Baik dibidang olahraga, kesenian, budaya dan pendidikan. Kebijakan ini didukung oleh kekuatan kolektif dari kebersamaan para aktor pembangunan. Baik DPRD maupun eksekutif menyediakan pelayanan tanpa mementingkan diri sendiri. Dewan sendiri berperan optimal dalam melaksanakan fungsi utamanya dalam penganggaran, legislasi dan pengawasan. Dewan secara terbuka menginformasikan agenda dewan kepada publik

Dalam pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kelestarian lingkungan, kepentingan warga dan pemenuhan kebutuhan lapangan kerja bagi kelompok muda dan usia produktif. Pihak swasta atau investor yang datang ke Kabupaten Dompu secara transparan memberikan gambaran konsep pengelolaan usahanya dihadapan para pihak (Masyarakat, OMS, Pemda) sehingga terbangun iklim usaha yang transparan, akuntable, efektif, efisien dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan kawasan Tambora dan kawasan-kawasan lainnya mengedepankan prinsip keadilan, ramah lingkungan dan partisipasi warga setempat.

Potensi sosial ekonomi dikelola secara bijak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Petani dan nelayan sadar membangun dirinya sendiri untuk mengelola "lumbung pangan abadi" sebagai bukti ketahanan pangan yang dikelola secara kolektif berdasarkan nilai dan kearifan local. Tersedia layanan Bank Rakyat miskin yang menyediakan layanan permodalan yang mudah tanpa beban agunan.

Peran media dalam menyebarluaskan informasi sangat dibutuhkan. Publikasi informasi yang berkaitan dengan asset, potensi dan keberhasilan pembangunan melalui media yang tersedia yang mudah dijangkau warga. Media baik cetak maupun elektronik bekerja dengan efektif, proporsional dan berimbang untuk mempublikasikan pembelajaran warga dan menjadi alat control warga terhadap proses pembangunan.

Kabupaten Dompu Madani memiliki pemimpin yang berpihak pada masyarakat miskin, memiliki SDM yang berkualitas sehingga dapat mengelola Sumber Daya secara bijaksana dengan memperhatikan kelestarian alam, nilai-nilai agama, sosial budaya dan kearifan lokal. Sarana ibadah yang ada difungsikan bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai media bagi warga terutama perempuan, anak, orang miskin dalam mendiskusikan perubahan-perubahan sosial.

AGENDA UTAMA KABUPATEN DOMPU

5 Agenda TKLD kab Dompu :

I. Penegakan Supremasi Hukum

- a. Mengkomunikasikan visi TKLD
 - Melakukan sosialisasi, kampanye, sarasehan hasil TKLD
 - Mengoptimalkan perda2 yang belum berjalan
 - Membuat peraturan yang pro poor
- b. Menggalang dukungan para pihak
 - Penguatan kapasitas para pihak
 - Pertemuan lintas sector
- c. Menjamin keberlanjutan
 - Ada ruang untuk koordinasi, komunikasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
 -

II. Pelayanan public

- a. Mengkomunikasikan visi TKLD
 - Koordinasi dan konsultasi kesejumlah pihak terkait
 - Penyebaran informasi melalui media
 - Sosialisasi (kampanye) tentang TKLD
- b. Menggalang dukungan para pihak
 - Hearing ke legislative & eksekutif
 - Ketersedian data-data yang lengkap dan akurat
 - Memaksimalkan fungsi FLA dan mengali kemitraan dengan pihak lain
- c. Menjamin keberlanjutan
 - Membangun keswadayaan dan keperdulian para pihak
 - Menjalin kemitraan secara berkelanjutan
 - Memberikan informasi dan data yang lengkap dan akurat secara transparan

III. Membangun Keswadayaan Warga

- a. Mengkomunikasikan visi TKLD
 - Diskusi dan promosi visi TKLD
 - Dialog interaktif lewat radio
 - Diskusi komunitas
 - Menjadikan acara –acara kegiatan sosial kemasyarakatrnrn sebagai media penyebaran informasi
- b. Mengalng dukungan para pihak
 - Memberikan ruang partisipasi bagi kader lokal dan warga
 - Melibatkan pihak swasta dan mendukung keswadayaan warga
 - Persamaan persepsi peran para pihak
- c. Menjamin keberlanjutan
 - Mengembangkan metode community led dan positive deviance
 - Pembelajaran silangdampak program
 - Membangun nilai-nilai kearifan local

IV. Pengelolaan Lingkungan dan SDA mandiri berkelanjutan.

- a. Mengkomunikasikan visi TKLD
 - Hearing dan diskusi
 - Pendidikan dan politik
 - Dialog interaktif “radio”
- b. Menggalang dukungan para pihak
 - Keterbukaan ke para pihak dlm pengelolaan lingkungan & SDA
 - Mendukung tokoh kunci
 - Sosialisasi dengan OMS
 - Menjamin keberlanjutan
 - Penguatan kapasitas FLA dan OMS
 - Bentuk forum diskusi dan aksi masyarakat
 - Bangun komunikasi yang intent dengan multi pihak

V. Optimalisasi Forum Lintas Aktor & membangun ruang bersama pada setiap tahapan proses pembangunan

- Identifikasi actor perubahan, semakin memperluas keterlibatan para pihak
- Koordinasi dan komunikasi intens FLA melalui pertemuan berkala
- Penyebarluasan melalui media
- Diskusi dengan para pihak sinkronisasi program
- Pengawasan proses pembangunan dari perencanaan, penganggaran dan monitoring dimana BAPEDA Dompu sbg dapur perencanaan bersama para pihak.
- Sekretariat bersama(bisa fisik dan non fisik)→3 bulan ke depan pertemuan ini dilanjutkan di ruang BAPEDA untuk mengkongkritkan agenda & membangun rencana aksi bersama.

Summary Concept Paper

-01-

Kabupaten: Dompu
Organisasi: LenSA Dompu
Judul: Advokasi kebijakan dan Partispasi Masyarakat sipil dalam proses perencanaan penganggaran yang pro masyarakat miskin

Usulan Lokasi:

Usulan Periode: -

Analisis bahwa standard perencanaan nasional belum optimal diterapkan di tingkat kabupaten sampai desa, memberi landasan bagi LenSa untuk mendorong jaminan berupa aturan daerah yang menjadi turunannya serta tersedianya sumber daya yang handal alam proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Oleh karena itu, LenSA terpanggil untuk turut serta membangun partisipasi masyarakat sipil dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang Demokratis, berbasis perencanaan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Secara khusus agenda yang mereka usulkan didedikasikan untuk: 1). Membangun kesadaran masyarakat sipil terhadap urgensinya partisipasi dan keberpihakan dalam perencanaan penganggaran; 2). Membangun konsolidasi dan gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan penganggaran yang partisipatif dan berpihak pada masyarakat miskin. 3). Membangun komitmen pemerintah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan perencanaan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Adapun strategi dan kegiatan yang dirancang mencakup penguatan kapasitas dalam hal proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif, community organizing, penguatan jaringan, advokasi penganggaran, kampanye, publikasi, refleksi dan pembelajaran.

-02-

Kabupaten: Dompu
Organisasi: LESPEL
Judul: Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel Dalam Mendorong Tata Pemerintahan Lokal Demokratis di Kabupaten Dompu.
Usulan Lokasi: Kabupaten Dompu (40 desa di enam Kecamatan --Hu'u (6 Desa),Kec. Pajo (5 Desa),Kec.Manggelewa(6 Desa),Kec .Dompu (8 Desa)Kec. Woja (9 Desa) dan Kec. Kilo (6 Desa)--
Usulan Periode: -

Mengandalkan kekuatan yang mereka miliki di tingkat desa seperti fasilitator desa, jaringan kader desa dan organisasi masyarakat lainnya mendorong LESPEL untuk memperluas upayanya selama ini untuk turut serta membangun Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kaum miskin (*pro-poor planning and budgetting*). Pengalaman implementasi BUMDes yang dikelola secara baik di kabupaten Dompu semakin mengisyaratkan bahwa ada potensi desa yang dapat dikembangkan untuk mendukung tata pemerintahan lokal demokratis. LESPEL mengusulkan sebuah rencana aksi yang dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat terutama bagi orang miskin, pemuda, perempuan dan kelompok terpinggirkan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntable; meningkatkan daya kritis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil tentang pola kebijakan perencanaan dan penganggaran dari desa – kabupaten,; mendorong pihak eksekutif dan legislative untuk memperkuat support system bagi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender yang berpihak pada orang miskin, pemuda, perempuan dan kelompok terpinggirkan, dan mendorong pemerintah desa dan pemerintah kecamatan menjadi model pelayanan public yang transparan, akuntable dan berkeadilan social. LESPEL mengidentifikasi sejumlah institusi seperti BPMD, BAPPEDA, LSM, FLA, anggota legislative, PNPM dan PKH, kader dan organisasi desa sebagai aktor-aktor yang potensial yang dapat mendukung perwujudan mimpinya. Dalam kosep papernya, mereka merancang strategi seperti pemberdayaan dan penguatan kapasitas, mendorong interaksi dinamis antar pihak dan perluasan dampak. Secara eksplisit konsep paper ini menyebutkan lembaga-lembaga lain di kabupaten Dompu seperti YPN, LPKM, Madafaku, LPMP, SBMI, YP2MD, SAMBIRIO dan LEPAS sebagai tim pendukung agenda aksi ini.

-3-

Kabupaten: Dompu

Organisasi: Yayasan Bina Cempe (YBC) didukung dan kerjasama dengan lembaga :
Yayasan BinaNusa Dompu dan Yayasan SAMBIRIO

Judul: **Terwujudkan partisipasi dan relasi setara antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai perwujudan TKLD.**

Usulan Lokasi: Seluruh desa di Kec. Pukat, Kec. Kempo

Usulan Periode: -

Setelah melakukan analisis kesejahteraan partisipatif (AKP) dan survey status gizi di desa Tambora dan Desa Sorinomo, YBC melihat kegiatan tersebut sangat penting dalam mendorong pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Mereka menginginkan pembelajaran dari apa yang selama ini dilakukan dapat memicu desa-desa lainnya. YBC bersama dengan YBN dan SAMBIRIO kemudian membangun kolaborasi dalam sebuah rencana aksi untuk mendukung apa yang menjadi visi dan agenda bersama kabupaten Dompu. Tujuan utama dari rencana aksi tersebut adalah untuk mewujudkan partisipasi dan relasi setara antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai perwujudan TKLD. Secara khusus, baik YBC, YPN dan Sanbirio ingin memperkuat kapasitas institusi local sebagai pendukung dan actor penggerak dalam masyarakat; melakukan pendataan yang akurat dan partisipatif sebagai sumber pendataan desa dalam merumuskan program dan regulasi; mendorong kerjasama kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil gender dan berkeadilan social, dan mendorong lahirnya regulasi yang mengakomodir pengelolaan sumber daya alam. Aktor-aktor yang akan terlibat dalam rencana aksi kedepan adalah pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daeran, legislative, Forum

Kawasan Tambora, FP2KK Kempo, CBO dan actor penggerak dalam desa serta PNPM. Penerima manfaat utama dari rencana aksi ini meliputi perempuan, warga miskin, pemuda dan masyarakat marjinal, CBO, kader dan forum-forum warga serta pemerintah baik ditingkat desa, kecamatan sampai kabupaten serta legislative. Mereka merancang strategi-strategi partisipasi warga dalam semua proses, pengembangan kapasitas kader dan institusi lokal, kerjasam/kolaborasi multipihak, participatory data based, perluasan dampak program dan pembelajaran, advokasi kebijakan, internalisasi nilai-nilai democratic governance. Pihak lain yang diharapkan menjadi bagian dari pencapaian tujuan aksinya antara lain, World Neighbors dan Bappeda Kabupaten Dompu.

-4-

Kabupaten: Dompu
Organisasi: LPMP
Judul: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Program Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis di Kabupaten Dompu NTB
Usulan Lokasi: 8 kecamatan di wilayah Dompu (Seluruh Kecamatan)
Usulan Periode: -

Sebagai tanggung jawab sosial dan moral kami dalam membangun masyarakat Kabupaten Dompu, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pelaksanaan Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis, maka tujuan yang kami ingin capai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :1). Terbangunnya interaksi dinamis pada semua komponen yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan pendidikan gratis dan kesehatan gratis ini; 2). Terbangunnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pendidikan gratis dan kesehatan gratis; 3). Mendorong kerjasama multipihak dalam pelaksanaan pendidikan gratis dan kesehatan gratis; 4). Mendorong keberpihakan terhadap gender dalam pelaksanaan pendidikan gratis dan kesehatan gratis; 5). Tertata dan terbangunnya manajemen pelayanan yang prima dalam pelaksanaan pendidikan gratis dan kesehatan gratis, sehingga tidak akan muncul masyarakat yang tidak dilayani dengan baik; 6). Terbangunnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat dalam pengawalan pelaksanaan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Strategi yang akan dipergunakan meliputi koordinasi dan komunikasi, pemantauan pelayanan public oleh warga, informasi diseminasi, penguatan kapasitas dan pengorganisasian. Stakeholder lain yang terkait dalam pencapaian rencana aksi ini meliputi kepala daerah, DPRD, Muspida, SKPD terkait, tokoh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, LSM, pemerintah kecamatan dan Desa, wartawan, komite sekolah dan masyarakat umum.

-5-

Kabupaten: Dompu
Organisasi: Lembaga Pengembangan Sumber Daya (Le-PAS)
Judul: *Pendampingan Sosial, Hukum dan Bimbingan Pemulihan Kejiwaan bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran (PM) Bermasalah*
Usulan Lokasi: Kecamatan Dompu: Desa Mbawi, Desa Dorebara;
 Kecamatan Manggelewa: Desa Sori Utu, Desa Kwangko, Desa Lanci Jaya, Desa Nusa Jaya;
 Kecamatan Kempo: Desa Kempo, Desa Soro, Desa Doro Kobo;
Usulan Periode: -

Le-PAS mengembangkan sebuah rencana aksi sebagai bentuk kepedulian bersama untuk memberikan jaminan perlindungan social, kepastian secara hukum serta pemulihan status kejiwaan (psikologis) terhadap kompleksnya kasus kekerasan yang dialami masyarakat. Baik terhadap kasus kekerasan anak, perempuan (KDRT) maupun terhadap Pekerja Migrant (PM) bermasalah umumnya di Kabupaten Dompu dan khusus daerah binaan lembaga. Rencana aksi ini diusulkan kepada ACCESS sebagai bagian dari upaya implementasi visi dan agenda bersama kabupaten Dompu. Secara khusus rencana aksi ini untuk hendak mengupayakan pemulihan/perubahan status kejiwaan/mental /psikis serta kepercayaan diri para korban tindak kekerasan, agar bisa kembali pulih dan normal kembali. Sehingga kedepan dapat berinteraksi secara normal dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti biasa; mengembangkan pendekatan untuk motifasi para korban tindak kekerasan secara bertahap menghilangkan rasa ketakutan/traumatik akibat perlakuan kekerasan yang dialaminya; mengadvokasi sarana untuk menjamin pelayanan sosial, konsultatif dan memberikan kepastian hukum serta memberikan pendampingan terhadap para korban tindak kekerasan; dan mendorong partisipasi aktif dan kepedulian sosial semua pihak terhadap upaya pemulihan dan pemandirian bagi korban kekerasan. Penerima manfaat utama dari proses ini adalah korban tindak kekerasan (anak dan perempuan), pekerja migran bermasalah atau yang mendapat perlakuan kekerasan, orang tua/keluarga korban kekerasan, mantan dan calon TKI/TKW, pemerintahan desa dan organisasi desa setempat, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap pemberantasan tindak kekerasan. Strategy yang diusulkan meliputi Survey dan Identifikasi data/kasus kekerasan; implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA); advokasi kebijakan; penguatan kapasitas lifeskil; Layanan Rumah Aman (Shelter Home); Penguatan/pengorganisasian OMS/kelompok peduli pemberantasan tindak kekerasan; Study banding/kunjungan silang tentang penanganan kasus korban tindak kekerasan; Pendampingan korban KTK dan PM bermasalah; dan Pengembangan jaringan kemitraan.